

GEREJA DAN ELIT LOKAL DI TOBELO

Gloria Miagina Palako Djurubassa

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Halmahera

Email: ipalakoka@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai gambaran Gereja (GMIH) dan elit lokal di Tobelo dengan menggunakan salah satu pendekatan elit, yaitu teori Mosca. Fenomena keberadaan individu atau sekelompok kecil orang (kemudian akan di sebut elit) yang menguasai sumber daya tertentu memang dapat ditemui di mana saja, termasuk di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kaum Elit merupakan golongan sosial terkemuka yang menempati posisi dan memainkan peran penting dalam perubahan sosial kemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan tentang gereja (GMIH) sebagai struktur dan basis elit lokal di Tobelo. Selanjutnya, dengan menggunakan strategi analisis posisi, penelitian ini mengidentifikasi peranan dan pengaruh gereja (GMIH) serta kader GMIH sebagai elit yang berkuasa, khususnya di ranah agama dan politik lokal.

PENDAHULUAN

Gereja merupakan bagian integral dari sistem sosial. Dalam struktur masyarakat lokal, gereja identik dengan pusat kekuasaan lokal dan aktivitas politik terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadikan gereja sebagai elit dan menempatkan gereja tidak lagi berada di ranah privatisasi dan marjinalisasi agama.¹ Secara internal, gereja adalah komunitas spiritual mengenai proses perubahan kehidupan menuju kedewasaan rohani. Secara eksternal, gereja membawa nilai-nilai Kerajaan Allah ke dalam dunia sesuai misinya melalui kehidupan gereja itu sendiri.

Tidaklah mengherankan jika gereja memiliki pengaruh besar dikalangan masyarakat, sebab gerejalah yang selama ini berbaur dalam masyarakat, wajar saja jika masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja. Masyarakat merasa aman manakala gereja turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan termasuk masalah politik dan konflik berkepanjangan yang terjadi di ranah lokal. Hal ini menjadikan posisi gereja

¹ Gereja diprivatkan : gereja hanya merupakan urusan pribadi, bukan sosial. Gereja mengurus soal-soal kehidupan spritual dan domestiknya saja. Dengan begitu gereja terpinggirkan dan menarik diri ke dalam zona aman dan nyaman sebagai semata entitas spiritual dan domestik. Pada sisi keilmuan "para pendukung teori sekularisasi menggunakan tesis privatisasi untuk mempersalahkan agama yang memasuki wilayah publik secara tidak sah atau melanggar batasan-batasan sistematis dengan mengambil peran-peran non relijius," Jose Cassanova, Agama Publik di Dunia Modern. (Surabaya/Malang/Jogja : Pustaka Eureka + LPIP + ReSIST, 2003), hlm, 364.

menjadi representasi masyarakat, sehingga yang terjadi adalah suara masyarakat sering identik dengan kebijakan gereja dan sebaliknya. Gereja berhadapan langsung dengan masyarakat, menjadi mediator dalam bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Disamping itu, gereja juga memiliki keterwakilan dalam struktur pemerintahan, baik itu di eksekutif maupun legislatif, pusat ataupun daerah, dan juga secara serius mempersiapkan kader yang akan menduduki posisi petinggi pejabat pemerintahan. Gereja memiliki kekuatan jaringan dan kader yang mampu menjangkau dan mempengaruhi semua kalangan. Keberadaan tokoh-tokoh gereja yang menjadi panutan merupakan instrumen penting yang cukup efektif menjadikan gereja memiliki posisi elit sebagai penguasa lokal.

Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi gereja yang berada di Wilayah Maluku Utara dan berkedudukan di Tobelo. Pembentukan GMIH diawali dengan diadakannya pertemuan pada tahun 1948 yang dalam arsip GMIH disebut Proto - Sinode kedua – Proto - Sinode pertama diakui terjadi pada tahun 1940 di Desa Kupa-Kupa, Tobelo. GMIH secara kelembagaan berdiri pada tanggal 6 Juni 1949, di jemaat Gamsungi (Tobelo) yang dianggap sebagai Jemaat Pusat. Dalam Sidang Sinode pertama, ditetapkan 3 agenda, yaitu :

1. GMIH dideklarasikan sebagai gereja mandiri;
2. Pentabhisian Badan Pengurus Sinode GMIH;
3. Serah terima tanggung jawab pelayanan dari VNZ kepada BPS GMIH yang baru.

Dalam perjalanannya, GMIH menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah keberadaannya. Pasca konflik horizontal yang terjadi pada tahun 1999 dan 2000 (Djurubassa., 2017), GMIH perlu mengevaluasi kembali keberadaannya dalam membangun kembali hubungan persaudaraan yang rukun dan damai di wilayah pelayanan Maluku Utara. Selain itu peluang untuk mengembangkan GMIH sebagai organisasi yang dapat menjawab kesejahteraan warganya harus dilakukan. GMIH harus dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam menyiapkan warganya menghadapi kondisi tersebut.

Dengan refleksi pengalaman historis maupun realita yang dialami, Warga GMIH kemudian menyadari bahwa Gereja Masehi Injili di Halmahera tidak di bangun dengan berdasar pada satu suku saja namun terbuka pada siapa saja (oikumenis). Dan karena GMIH itu berada dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia maka sebagai Organisasi Keagamaan, GMIH harus tunduk pada aturan penguasa di dunia, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah untuk wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Di satu sisi GMIH harus mengikuti iman dan ajarannya, disisi lain Gereja harus mengikuti Aturan dan Kebijakan pemerintah yang bisa saja merugikannya.

Inilah yang terjadi pada masa Orde Baru. Tiga dekade awal setelah GMIH hadir di Maluku Utara merupakan masa terbaik pelayanan GMIH. Namun suksesi kekuasaan dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru (Orba) beserta kebijakannya dalam menerima investasi asing, tidak diimbangi dengan regulasi yang baik di segala sektor sehingga menciptakan kesenjangan sosial. Kerjasama dengan gereja mitra luar negeri mendapat pengawasan ketat

dan dibatasi. Isu-isu agama diciptakan (Kristenisasi/Islamisasi) kemudian menimbulkan prasangka-prasangka buruk dalam masyarakat.

Dalam menguatkan dominasi elit dan penguasa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Maluku Utara, Gereja menempatkan tokoh-tokoh agamanya sebagai wakil rakyat dan menciptakan “demokrasi semu”. Pemerintah Orba memahami bahwa warga gereja atau warga jemaat mematuhi tokoh agamanya yakni Pendeta, Penatua, Syamas, Diaken dan jabatan pelayan Tuhan lainnya. Warga gereja tentunya lebih mendengar pelayan Tuhan dari pada pemimpin daerah.

Nyatanya, Elit-elit GMIH lebih cenderung tertarik pada persoalan kontestasi politik lokal daripada menyembuhkan traumatis akibat konflik horizontal yang pernah terjadi. Gereja yang harusnya merefleksikan iman dan ajaran tentang Kasih harus menghadapi polemik demokratisasi lokal karena permainan elit-elit GMIH. Sejak Sidang Sinode (SS) yang dilaksanakan di Desa Wari, Tobelo tahun 2002, persoalan politik dengan gereja, dalam hal ini pelayan Tuhan (pendeta) yang ikut berpolitik menjadi diskursus yang hangat. Demikian halnya dengan Sidang Sinode yang dilaksanakan tahun 2007 dan tahun 2012, yang kemudian berakhir pada terbentuknya dua kepengurusan sinode. Kepengurusan SS Dorume yang mendukung Pendeta yang berpolitik dan kepengurusan SSI (Sidang Sinode Istimewa) 2013 yang mendukung pembaharuan GMIH dan menolak Pendeta berpolitik.

Setelah yang terjadi di tahun 2013, karena pengaruh dari proses politik lokal yakni penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku utara, BPS GMIH melaksanakan Sidang Majelis Sinode (SMS) yang ke IV di Pulau Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil dari sidang itu mengeluarkan surat keputusan dengan No: 11/Kpts/SMSIV/2015 Tentang pesan dan rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan yaitu tentang Sikap Politik Gereja dan Sikap Gereja Secara Internal. Mengenai sikap politik gereja, diatur bahwa Gereja perlu mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di wilayah Maluku Utara, dan GMIH harus mendukung pemimpin dengan kriteria: (1) Berjiwa Nasionalis dan Berintegritas, (2) memiliki pengalaman di pemerintahan dan legislatif, (3) memiliki loyalitas dan hubungan emosional dengan GMIH.

Hal inilah yang memunculkan pertanyaan, bagaimana gereja (GMIH) menjadi bagian dari elit lokal dalam perpektif Mosca. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peran Gereja (GMIH) dan elit lokal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

KERANGKA TEORITIK

1. Elite Menurut Mosca

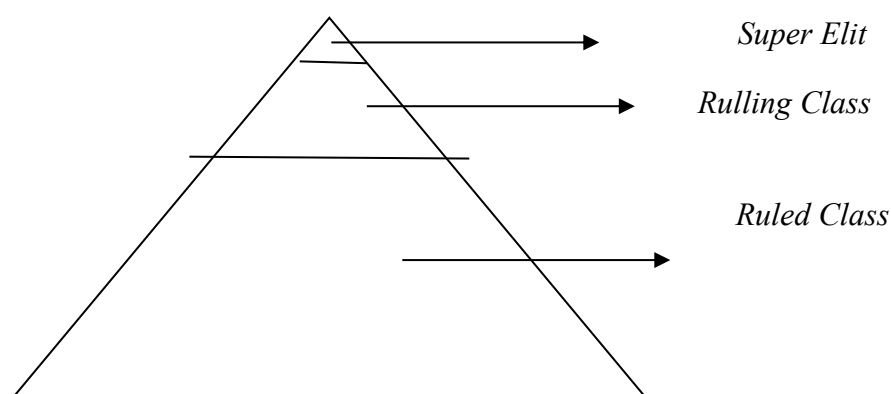
Mosca mengatakan bahwa di setiap jenis masyarakat pada setiap titik sejarah, ada dua kelas orang-kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Yang pertama berisi sejumlah beberapa orang dan dimiliki semua kekuatan politik dan hak istimewa sedangkan yang kedua terdiri dari sejumlah besar orang dan mengalami pemerintahan mantan dan menyediakan penting berperan untuk organisasi politik²

² Gaetano Mosca, *The Rulling Class*, 1939 : 50

Menurut Mosca, dua fakta politik harus dipertimbangkan untuk menganalisis hubungan antara kelas penguasa dan kelas memerintah. Fakta pertama adalah bahwa selalu ada satu orang yang menjadi pemimpin organisasi politik antara kelas penguasa. Individu ini tidak selalu orang yang memegang posisi politik tertinggi menurut hukum. Bahkan dia belum tentu diketahui oleh semua orang, misalnya dapat menjadi perdana menteri raja atau presiden atau orang yang membuat presiden yang akan terpilih. Orang ini menurut Mosca sering disebut sebagai super elit.

Dalam kondisi tertentu, kekuasaan tertinggi ini bisa di tangan lebih dari satu orang. Fakta kedua adalah terlepas dari jenis organisasi politik, tekanan massa untuk berkuasa kelas dan kebijakannya. Oleh karena itu, kelas penguasa, atau kepala negara, harus peka tentang pemikiran dan perasaan massa untuk mendapatkan dukungan mereka, kalau tidak, ia tidak bisa memerintah. Untuk alasan ini, setidaknya kelompok besar dari massa dibuat untuk mendukung kelas penguasa dan sistem³

Gambar 1.1. Kerangka Analogi Struktur Elit Menurut Mosca



Kelas yang berkuasa, menurut Mosca, sederhana: kemampuan untuk mengatur dengan mudah dan efektif. Minoritas selalu terorganisir, sehingga ia memiliki kemampuan untuk mengatasi mayoritas. Untuk Mosca hubungan ini dan hasilnya tidak dapat dihindari. Pembentukan kelas penguasa memiliki hubungan erat dengan tingkat peradaban dan jenis masyarakat. Hukum kelas di bawah setiap kondisi mencoba untuk mereproduksi dirinya sendiri terutama dengan dominasi pada kekuatan politik seperti kekuasaan, kekayaan dan kelas penguasa cenderung datang turun-temurun. Bahkan, keturunan memerintah anggota kelas memiliki kesempatan hidup yang tinggi untuk memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi anggota kelas penguasa⁴. Secara umum, sebelum demokrasi, keanggotaan kelas yang berkuasa tidak hanya *de facto* tapi juga *de jure*. Dalam demokrasi, *de jure* transfer kepemilikan politik untuk keturunan anggota kelas penguasa tidak mungkin dan tidak dilegitimasi tapi sekarang *de facto*.

Menurut Mosca, historis, kelas yang berkuasa mencoba untuk membenarkan keberadaan dan kebijakan dengan menggunakan beberapa prinsip moral universal,

³ Ibid, 50 -53

⁴ Ibid, 60-61

keunggulan dan lain-lain akhir-akhir ini, teori ilmiah dan pengetahuan seperti Darwinisme Sosial, pembagian kerja juga digunakan untuk tujuan yang sama. Mosca khususnya menolak dua tesis ini untuk digunakan dalam kepentingan politik. Untuk Mosca, pada tingkat tertentu peradaban, kelas yang berkuasa tidak membenarkan kekuasaan mereka secara eksklusif oleh *de facto* kepemilikan itu, tapi mencoba untuk menemukan landasan moral dan hukum untuk itu. Dasar atau prinsip-prinsip hukum dan moral yang kekuatan sisanya kelas politik disebut "rumus politik" oleh Mosca. Rumus memiliki struktur yang unik dalam semua masyarakat. Menurut Mosca, rumus politik harus didasarkan pada keyakinan khusus dan sentimen kuat dari kelompok sosial saat ini atau setidaknya pada keyakinan dan sentimen dari bagian tertentu dari kelompok itu yang memegang keunggulan politik⁵

Bahkan kelas penguasa seperti strata elit Pareto terdiri dari dua strata: (a) lapisan tertinggi, dan (b) strata kedua. Lapisan tertinggi adalah inti dari kelas penguasa tetapi tidak bisa cukup memimpin dan mengarahkan masyarakat kecuali lapisan kedua membantu. Strata kedua adalah lebih besar dari strata yang lebih tinggi dalam jumlah dan memiliki semua kapasitas kepemimpinan di sebuah negara. Bahkan sistem otokratis memilikinya. Tidak hanya politik, tetapi juga semua jenis organisasi sosial perlu lapisan kedua agar mungkin⁶

Para anggota kelas penguasa harus direkrut hampir seluruhnya dari dominan, kelompok mayoritas di masyarakat. Jika masyarakat memiliki sejumlah minoritas dan jika aturan ini tidak diikuti karena kelemahan dari kelompok dominan, sistem politik dapat memenuhi krisis politik yang serius. Hal yang sama terjadi ketika ada perbedaan yang cukup besar antara dalam budaya, dan adat istiadat dari kelas penguasa dan subjek kelas⁷

Kelemahan dari kelompok dominan dalam masyarakat dan isolasi kelas bawah dari kelas penguasa dapat menyebabkan pergolakan politik di negara itu dan sebagai akibat dari pergolakan ini perwakilan kelas subjek dapat memiliki tempat di kelas penguasa. Karena ketika isolasi berlangsung, kelas penguasa lain muncul di kalangan kelas subjek yang sering bermusuhan dengan kelas penguasa lama⁸. Selanjutnya, karena isolasi timbal balik dari kelas, karakter kelas atas berubah, mereka menjadi lemah. Pada jalur yang sama, ketika ada fragmentasi dalam masyarakat, kelompok-kelompok baru terbentuk dan masing-masing dari mereka membuat para pemimpin dan pengikutnya sendiri. Selain revolusi ini adalah salah satu sumber penggantian kelas penguasa⁹

Ketika Mosca membandingkan sistem politik, ia mengatakan bahwa masyarakat komunis dan sosialis akan tanpa keraguan dikelola oleh pejabat dan ia melihat rezim ini sebagai Utopia . Pada demokrasi, katanya, meskipun meningkat secara bertahap dari hak pilih universal, kekuatan yang sebenarnya tetap sebagian di orang-orang terkaya dan kelas menengah. Pada saat yang sama, untuk Mosca, kelas menengah diperlukan untuk demokrasi, dan ketika penurunan kelas menengah, rezim politik di negara-negara demokrasi berubah menjadi kediktatoran plutocratic, atau kediktatoran birokrasi¹⁰

⁵ Ibid, p.71-72

⁶ Ibid, p.404 - 430

⁷ Ibid, p.105 - 107

⁸ Ibid, p.107

⁹ Ibid, p.163 - 199

¹⁰ Ibid, p.391

Menurut Mosca, kelas yang berkuasa memiliki karakter responsif terhadap perubahan sosial di masyarakat dan ada hubungan yang erat antara tingkat peradaban dan karakter kelas yang berkuasa. Menurut dua proposisi yang saling melengkapi ini, dapat dikatakan bahwa kelas yang berkuasa adalah subyek perubahan sosial ketimbang aktor itu. Sebagai contoh, perubahan dalam pembagian kerja dari rendah ke tinggi dan perubahan dalam kekuatan politik dari militer ke kekayaan telah mengubah jenis negara dari federal untuk negara yang birokratis¹¹. Ada tampaknya Mosca mengakui perubahan sosial linear dalam sejarah, sebagai berlawanan dengan Pareto.

Seperti yang terlihat, teori Mosca pada dasarnya didasarkan pada keunggulan terorganisir minoritas atas mayoritas terorganisir. Minoritas yang terorganisir ini terdiri dari kelas penguasa, tetapi untuk Mosca itu tidak berarti bahwa selalu kepentingan kelas penguasa dan kelas subjek yang berbeda. Baginya, sebaliknya mereka bertepatan berkali-kali. Dia melihat masa depan sistem sosialis dengan mengatakan bahwa hal itu akan diatur oleh petugas. Fitur ini sistem sosialis didokumentasikan dengan baik oleh Milovon Djilas dalam karyanya : Kelas Baru. Tapi Mosca gagal untuk melihat bahwa suatu hari, sebagian juga akan dapat mengatur. Seperti CW Mills menunjuk menempatkan, masyarakat Barat yang demokratis telah mengalami transformasi penting dari minoritas terorganisir dan tidak terorganisir mayoritas untuk minoritas yang relatif terorganisir dan mayoritas terorganisir , dan dari negara elit untuk sebuah negara yang terorganisir¹². Oleh karena itu minoritas dan elit dalam masyarakat saat ini kurang kuat dari mayoritas. Elit telah relatif kehilangan hak-hak mereka, dan yang lebih penting, monopoli mereka atas masyarakat.

2. Basis Legitimasi Elit Menurut Mosca

Gaetano Mosca mengembangkan teori elit dan mengklasifikasikan ke dalam dua status yaitu elit yang berada dalam stuktur kekuasaan dan elit yang diluar stuktural. Elit berkuasa menurut Mosca yaitu elit yang mampu dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta menjalankan kontrol social dengan ciri memiliki basis tertentu yakni *pertama*, basis kelahiran, elit sebagai tuan rumah karena terlahir didaerah tersebut. *Kedua*, basis kekayaan, elit berpengaruh karena memiliki sumber kekayaan materi untuk bisa mempengaruhi masyarakat hingga menguasai pengelolaan sumberdaya. *Ketiga*, basis pengetahuan yakni memiliki pengetahuan diatas rata-rata masyarakat pada umumnya yang membuat elit tersebut berpengaruh. *Keempat*, basis militer, elit sangat berpotensi untuk muncul dengan melakukan pendekatan elit tersebut adalah seorang personal militer ataupun kepolisian. Karena teori yang dipakai Mosca sangat jauh berbeda setting dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya tidak menutup kemungkinan munculnya elit berdasarkan basis diluar yang dijelaskan oleh Mosca.

¹¹ Ibid, p.81-83

¹² Ibid, p.161-162

PEMBAHASAN

A. Gereja (GMIH) dan Politik Lokal

Sejak di mekarkan menjadi propinsi pada tahun 2003, Maluku Utara mengalami perkembangan dan kemajuan. Rentang kendali kekuasaan pusat ke daerah menuntut perubahan terutama dalam dinamika praktek politik karena gagasan otonomi daerah. Salah satu kekuatan yang dominan pada level lokal adalah organisasi keagamaan. Hal ini dikarenakan masyarakat setiap hari hidup dengan dua sisi kehidupan ini. Masyarakat menjalani kehidupannya sebagai warga masyarakat dan warga agama secara berdampingan tanpa harus meninggalkan salah satunya.

Dalam konteks Halmahera Utara sebagai daerah pasca konflik, agama menjadi salah satu jalan terbaik dalam proses berpolitik. Peran politis ini bukanlah apresiasi miring terhadap dunia politik, namun sebaliknya memahami politik sebagai bagian dari hidup yang harus memiliki nilai-nilai baik di dalamnya. Dengan demikian, nilai keagamaan dalam tatanan hidup bersama termasuk dalam konteks politik lokal di Halmahera Utara, menjadi penting untuk diikuti oleh seluruh masyarakat, sehingga menjunjung nilai-nilai normatif universal yang terkandung dalam setiap agama dan selalu menghargai ciptaan menjadi landasan berpolitik di Halmahera Utara. Dengan demikian, dapat dianalisa bahwa salah satu kekuatan yang paling dominan pada level politik lokal adalah kekuatan agama yang direpresentasikan oleh organisasi-organisasi keagamaan. Di Maluku Utara, Organisasi keagamaan yang cukup berpengaruh dalam dinamika politik lokal adalah Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH).

Pengaruh GMIH dalam politik lokal di Halmahera Utara di lihat dari dominasi demografis pemeluk agama Kristen Protestan di wilayah Halmahera. Selain itu, GMIH memiliki jemaat yang jumlahnya besar dengan luas wilayah pelayanan di hampir seantero propinsi Maluku Utara. GMIH adalah organisasi gereja terbesar diantara gereja-gereja lainnya. Jumlah gereja yang terdaftar sebagai bagian dari GMIH pada tahun 2019 sebanyak 454 gereja (Kepengurusan SS Dorume/GMIH Lama) dan 200 lebih gereja (Kepengurusan SSI/GMIH Pembaharuan) dengan jumlah anggota jemaat 30 hingga 60 kepala keluarga pergereja dan masih terus mengalami peningkatan. Selain jumlah konstituen yang banyak, GMIH juga memiliki aset yang melimpah. Mulai dari Tanah kepemilikan, Yayasan pendidikan dan Perguruan Tinggi, hingga Badan Usaha Milik Gereja yang secara finansial mampu menjadikan GMIH sebagai organisasi keagamaan yang berada di posisi elit pada tingkat lokal. Hal ini jugalah yang membuat para Pelayan Tuhan memiliki akses pada ruang kontestasi di ranah politik. GMIH memberi dukungan terhadap beberapa kandidat yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah, maupun legislatif pada Pilkada 2018 dan 2019 di Wilayah kepulauan Halmahera.

Uniknya, banyak kader partai politik, elit lokal dan penguasa yang merupakan anggota jemaat GMIH. Dalam Struktur Badan Pekerja Harian Sinode GMIH Periode 2017 – 2022¹³ terdapat 2 Kepala Daerah yang menduduki jabatan penting, yakni Bupati Halmahera

¹³ sinodegmih.com/p/bphs-gmih-periode-2017-2022

Utara Pnt. Ir. Frans Manery sebagai Ketua III Sinode GMIH dan Bupati Halmahera Barat, Pnt. Danny Missi, MM sebagai Ketua V Sinode GMIH. Selain itu ada Anggota legislatif (DPRD) dari Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Barat, Pnt. James Uang, MM yang menjadi Ketua BP3G Sinode GMIH, beliau juga merupakan Bupati terpilih pada Pilkada 2020 Kabupaten Halmahera Barat. Dalam banyak kasus, GMIH memberikan dukungan dan kontribusi yang sangat besar dalam aktivitas politik lokal di Kabupaten Halmahera Utara. Para pemilih yang mayoritas adalah anggota jemaat GMIH cenderung terikat secara emosional untuk memilih serta memenangkan kandidat yang berasal dari GMIH. Hal ini yang menjadikan Gereja memiliki potensi kuasa yang besar sebagai elit kelas penguasa dalam pertarungan politik di Halmahera Utara.

B. Gereja (GMIH) dan Elit Lokal di Tobelo

Kajian mengenai elit berawal dari fakta bahwa ada perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga muncul kelompok yang mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam masyarakat yang sama. Kelompok-kelompok itulah yang disebut kelompok elit. Berdasarkan kerangka struktur elit Mosca, kekuasaan tertinggi terlepas dari jenis organisasi politik, maka dukungan paling besar untuk kelas penguasa setidaknya merupakan kelompok besar dari massa. GMIH merupakan kelompok besar dari organisasi keagamaan yang ada di Tobelo. GMIH merupakan organisasi gereja yang terorganisir dan merupakan kelompok mayoritas di Tobelo. Dalam hal ini, Menurut Mosca, GMIH bisa berada di kelas Elit Penguasa yang mampu mendominasi kekuatan politik seperti kekuasaan, kekayaan dan secara historis mampu di wariskan turun-temurun.

GMIH ketika memasuki ruang publik politik untuk merealisasikan tugas kritik ideologi dan konstruksi model-model inovatifnya sebagai elit, GMIH harus memahami ulang posisi dan peran politisnya dalam konteks relasi negara dan masyarakat. *Pertama*, GMIH lahir dan hidup di dalam konteks masyarakatnya yakni masyarakat Tobelo, Halmahera Utara. Karena itu, GMIH merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakatnya. Terutama selama ini, GMIH telah terlibat dalam proses reproduksi kultural (interpretasi dan transmisi tradisi-tradisi kultural), integrasi sosial (institusionalisasi dan koordinasi praktik-praktik tindakan sosial terpolo), dan sosialisasi (pengalaman-pengalaman dan kemampuan-kemampuan kognitif, linguistik, moral dan emosional yang membentuk identitas personal warga). Dalam konteks kehidupan sebagai gereja, GMIH juga selama ini telah mengalami apa yang disebut “kekerasan struktural” sistem politik maupun ekonomi. Pengalaman hidup masyarakat sebagai warga jemaat yang merupakan bagian dari masyarakat kota Tobelo adalah jalur-jalur perjalanan kehidupan GMIH sebagai elit di Tobelo.

Kedua, GMIH sebagai elit di luar struktural harus menyadari eksistensi politis (publik) dirinya. GMIH merupakan bagian integral dari *civil society* yang terjalin dalam jejaring *asosiasional civil society*. GMIH sebagai salah satu institusi *civil society* yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol sosial dengan ciri memiliki basis tertentu. *Ketiga*, sebagai yang lahir dan hidup dalam dunia-kehidupan sehari-hari masyarakat dan institusi *civil society*, GMIH pun patut

bertanggungjawab sebagai partisipan aktif dalam ruang publik politik dengan basis kelahiran. GMIH sebagai elit tuan rumah di Tobelo.

Keempat, basis pengetahuan yang dimiliki GMIH sebagai elit berpengaruh harus mampu menginternalisasikan dan mempraktikkan etika komunikatif yang berpusat pada rasionalitas dan aksi komunikatif di tingkat lokal masyarakat. GMIH juga harus mampu secara sukarela, mandiri, dan sadar hukum serta norma-norma masyarakat untuk membina relasi dan interaksi intersubjektif institusional dengan masyarakat. *Kelima*, sebagai elit yang terorganisir, GMIH harus melatih dirinya melalui forum atau ruang publik otonom. Di sini GMIH melakukan pendalaman tugas kritik ideologi maupun tugas konstruktif. Melalui rapat-rapat dan sidang-sidang gerejawi, GMIH membangun dan menyampaikan usul-usul berkaitan dengan model-model inovatif terkait dengan persoalan atau aspirasi masyarakat.

Hasilnya kemudian dibagikan dalam proses pengujian atau kritik dalam ruang publik politik dihadapan penyelenggaraan pemerintahan atau pihak-pihak lain. Secara tidak langsung GMIH dapat terlibat mengadvokasi masyarakat melalui pembentukan *critical and constructive public opinion* terkait dengan isu-isu penting dalam konteks relasi masyarakat dan negara. Pada tahap ini, GMIH harus belajar membiasakan diri masuki debat-debat atau diskursus-diskursus publik dalam rangka pembentukan dan mendorong secara kuat serta berdampak opini publik terkait dengan masalah-masalah dan aspirasi-aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Selanjutnya, guna mengidentifikasi apakah GMIH dapat dikategorikan sebagai elit yang berkuasa, khususnya di ranah agama dan politik, maka perlu menggunakan strategi analisis posisi. Strategi ini beranggapan bahwa lembaga-lembaga atau struktur-struktur yang sifatnya formal, pada dasarnya merupakan suatu peta hubungan kekuasaan yang dapat digunakan untuk menganalisa siapa elit yang berkuasa. Oleh karena itu, para individu yang menduduki posisi-posisi puncak dalam lembaga atau institusi formal tersebut, cenderung secara politis berkuasa. Faktanya, pelayan Tuhan di GMIH memang berada pada posisi-posisi puncak di ranah agama dan politik di Halmahera. GMIH yang menganut sistem *presbyteral sinodal* memberikan celah bagi politisi maupun penguasa di tingkat lokal untuk menduduki kursi kepemimpinan gereja di GMIH. Pada tatanan penguasa di ranah politik, Kader GMIH banyak menduduki posisi-posisi puncak dalam institusi-institusi pemerintahan, partai politik, dan institusi politik lainnya. Hal tersebut semakin menegaskan signifikansi kekuasaan GMIH sebagai elit lokal di Tobelo yang secara keseluruhan mayoritas penduduknya adalah anggota jemaat GMIH.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang identifikasi Gereja (GMIH) dan elit lokal di Tobelo, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Gereja (GMIH) memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen kekuasaan. Dengan kata lain, GMIH memainkan peran-peran politik sebagai elit penguasa yang memperoleh legitimasi awal yang kemudian berhasil dikonversi menjadi kekuasaan politik tingkat lokal. Posisi-posisi puncak kekuasaan politik yang diduduki kader GMIH dan Pelayan Tuhan dalam ranah politik lokal di Halmahera, mengindikasikan bahwa GMIH adalah elit lokal yang berkuasa. Temuan ini sejalan dengan

teori Mosca tentang elit dimana ada kelompok besar yang berkuasa dan mendapat dukungan kelas penguasa dan sistem. GMIH (terutama di aras sinode) merupakan organisasi agama terbesar di Maluku Utara, dan mempengaruhi beberapa kebijakan pemerintah lokal atau mempengaruhi keputusan Pemerintah Daerah. Walaupun teori Mosca memiliki kelemahan ketika diterapkan dalam struktur masyarakat yang memiliki basis struktur yang berbeda sehingga perlu mengorganisasikan dan mendayagunakan sumber daya-sumber daya itu sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan politik yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bottomere, T. B. 2006, *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute
- Jose Cassanova, *Agama Publik di Dunia Modern*, Surabaya: Pustaka Eureka
- Mojau, Julianus, 2007, *Peran Politis Tokoh Agama Dalam Pilgub Maluku Utara*, dalam Tabloit PERCIS Halmahera edisi I
- Mosca, Gaetano. 1939. *The Ruling Class*. London : Hill Book Company
- M.Th. Magany, 2012, *Bahtera Injil di Halmahera*, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara : BUMG-GMIH bekerja sama dengan Institut Hendrik van Dijken.
- Puasa, Anselmus, 2005, *Pendeta dan Partai Politik Suatu Tinjauan Teologi Sosial*, Yogyakarta: UKDW

Sumber-Sumber Lainnya :

- Jurnal Polinter FISIP UTA'45 Jakarta Vol.2 No.2 (September-Februari 2017) Hal.31-53
<https://sinodegmih.com/p/bphs-gmih-periode-2017-2022>